

Keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba: menganalisa penjelasan Fredy Budiman terpidana mati kepada Haris Azhar = The involvement of police officer on drugs crime analyzing the explanation of the death penalty charged Fredy Budiman to Haris Azhar

Fahmi Amarullah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445968&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai analisis keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba berdasarkan penjelasan dari Fredy Budiman kepada Haris Azhar ketika berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hasil penjelasan dari Fredy Budiman tersebut, kemudian Haris Azhar mempublikasikannya di media sosial Facebook yang membuat dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada Haris Azhar dan menghimpun dokumen terkait yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi Haris Azhar mempublikasikan penjelasan dari Fredy Budiman di media sosial dikaitkan dengan beberapa teori, maka dapat dianalisis sebagai berikut: dikaitkan dengan teori perilaku beralasan Ajzen dan Martin Fishbein, motivasi Haris Azhar tersebut dilakukan dengan suatu niatan agar masyarakat atau publik dapat mengetahui bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Fredy Budiman dapat berjalan dengan lancar karena dilindungi oleh aparat kepolisian, BNN dan TNI; dikaitkan dengan teori kepribadian Allport, motivasi Haris Azhar tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran dan kepribadiannya sebagai salah seorang aktivis yang menggeluti masalah-masalah sosial, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pernyataan dari Fredy Budiman kepada masyarakat; dikaitkan dengan teori komunikasi massa Menurut Jean Baudrillard, maka aksi yang dilakukan oleh Haris Azhar tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan media massa yang gencar membahas masalah publikasinya; sementara dikaitkan dengan teori Etika menurut Bertens, bahwa Haris Azhar sudah memperhitungkan dampaknya, yakni akan menuai pro dan kontra dimasyarakat. Sedangkan apabila dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka aksi yang dilakukan Haris Azhar adalah tidak mengarah pada subjek hukum manusia orang/naturali ke person tertentu karena tidak disebutkan dalam pernyataannya. Oleh karena itu pencemaran nama baik yang didakwakan kepadanya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, penerapannya harus mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana atau mengacu pada sumber hukum lain.

This thesis had made to discuss about the involvement of police officer, by analyzing the explanation of Fredy Budiman to Haris Azhar during the jail visit on 2014 at Nusa Kambangan. Based on that explanation, then Haris Azhar took an action by publishing the result on Facebook, that lead himself to be reported at Bareskrim Polri as defamation. This research is using the interview method on Haris Azhar and collecting related documents to be analyzed with qualitative descriptive approach. The result of this research showed that the purpose of Haris Azhar doing the publishment on social media can be related to some theories. The reasoned behavior theory by Ajzen and Martin Fishbein, explain the purpose of Haris Azhar is to have public attention about how the drugs crimes by Fredy Budiman can be run easily because of the involvement of Police Officer, BNN, and TNI. Allport's personality theory, explain that the purpose of Haris Azhar based on his mindset and personality as one of the Indonesian Social Activist. Mass

communication theory according to Jean Baudrillard, Haris Azhar's act can't be separated from the news on mass media that aggressively talk about what he did. Ethics theory by Bertens and Duska, Haris Azhar has considered the impact of his action that will cause the pros and cons in the community. Meanwhile, based on criminal law perspective and UU No 11 of 2008 about ITE, the defamation report to Haris Azhar should be referring to article 310 and 311 KUHP or referring to the other legal resources.